



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

**DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang maju dan sejahtera, sebagaimana yang termuat dalam Visi Sulawesi Selatan 2018-2023, yaitu” **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**. Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, diharapkan pembangunan akan meningkatkan nilai dan fungsi dari lingkungan itu sendiri dan bukan sebaliknya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Disamping itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk ,menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusuna kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka pendek disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020. Adapun fungsi Renja bagi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisiensi melalui program/kegiatan yang terukur.

Di akhir kata semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Makassar, Mei 2020

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
I. Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	5
I.3. Maksud dan Tujuan	8
I.4. Sistematika Pembahasan	9
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	11
II.1.Evaluasi Pelaksanaan renja.....	11
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	24
II.3.Isu-isu penting Penyelenggaraan Tusi PD.....	31
II.4..Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
III. Tujuan dan sasaran PD	49
III.1.Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	49
III.2Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	50
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....	56
V. Penutup	73

DAFTAR TABEL

nomor	halaman
1. T-C.29.	11
2. T-C.30	25
3. Pengukuran Kinerja DPLH TA.2019.....	28
4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPLH.....	32
5. Tujuan dan sasaran pelayanan DPLH Tahun 2021.....	52
6. T.C.33.....	60

DAFTAR GAMBAR

nomor		halaman
1.	Bagan alur Rancangan Renja OPD Pemerintah Provinsi.....	2
2.	Bagan alur hubungan perencanaan dan penganggaran.....	4
3.	Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun serta merupakan dokumen perencanaan teknis operasional Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berpedoman kepada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan, dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, agar pelaksanaan tugas yang diberikan berjalan efektif dan terarah maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja OPD menjadi mutlak sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan.

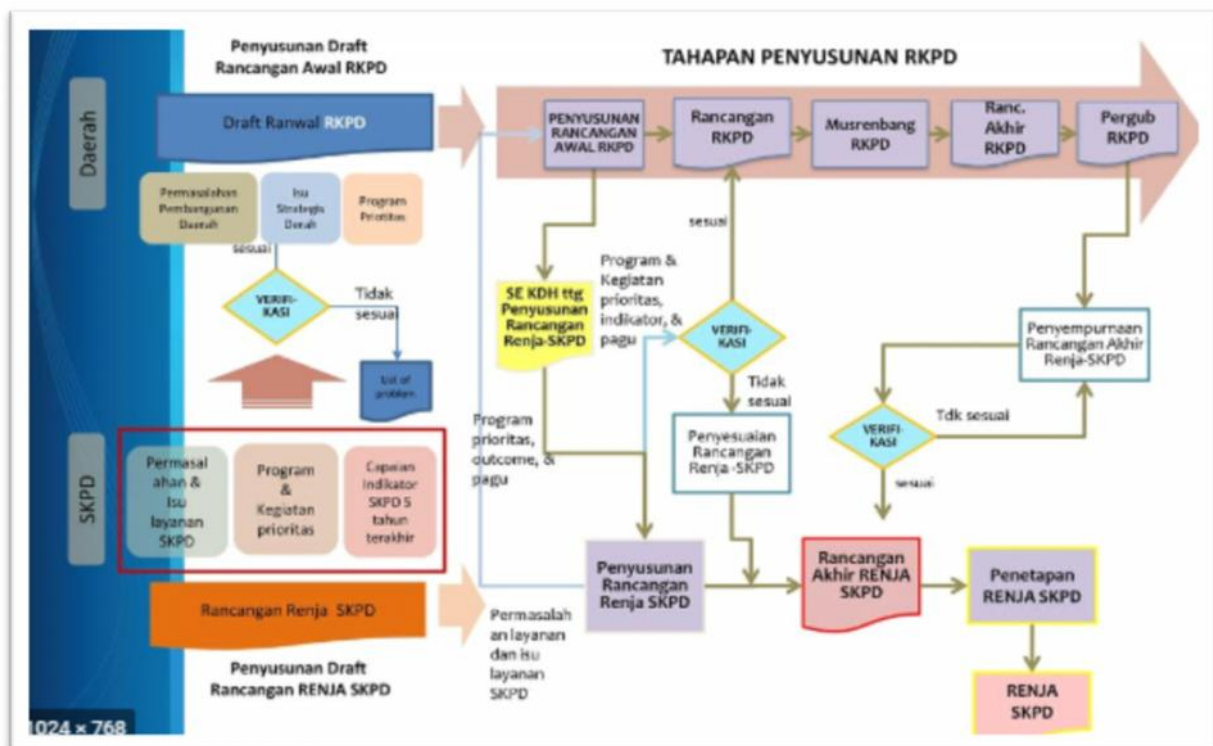
Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu pemerintah lebih focus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD yang digunakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Dimana prinsip penyusunan Rencana Kerja (Renja) antara lain;

1. Substansi Rencana Kerja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan Kegiatan dirinci berdasarkan sumber dana yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar : 1. Bagan Alur Rancangan Renja OPD Pemerintah Provinsi

Adapun persiapan penyusunan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja
- Pengumpulan data dan informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap perumusan Rancangan Renja

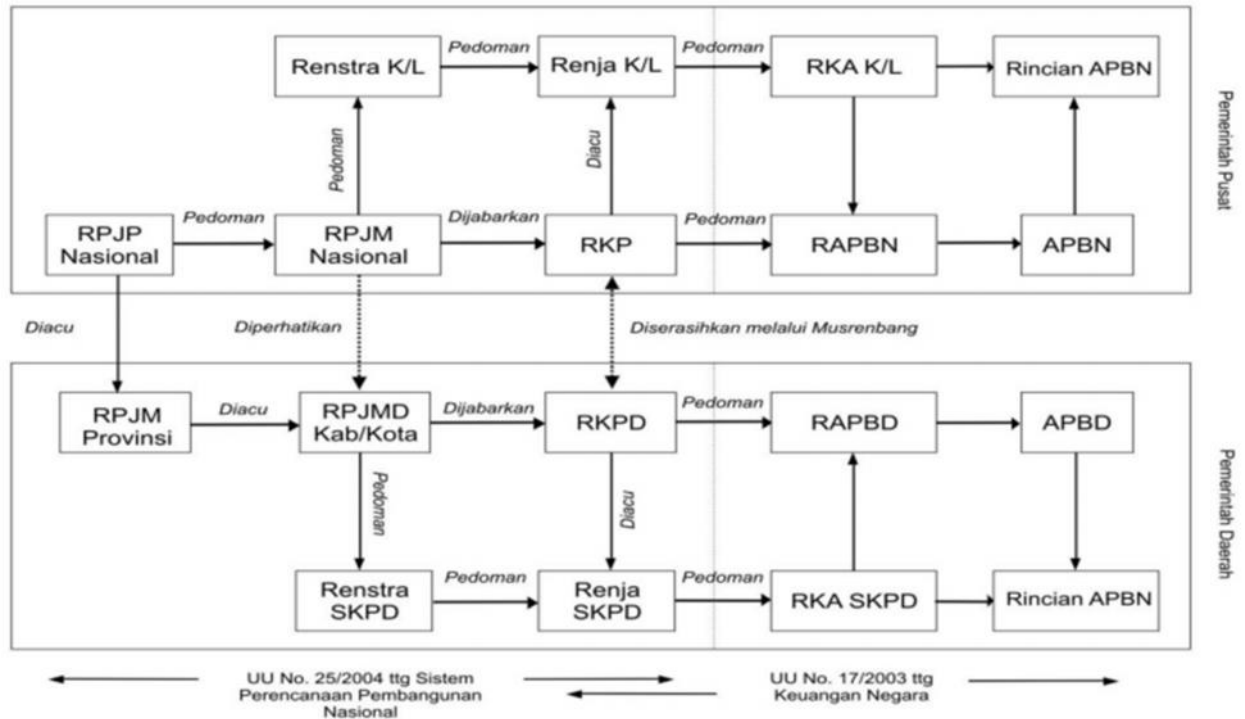
- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan OPD
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD.
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
- Telaahan terhadap rancangan awa RKPD.
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- Perumusan kegiatan prioritas.
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD
- Pembahasan forum OPD
- Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Rencana Kerja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD.

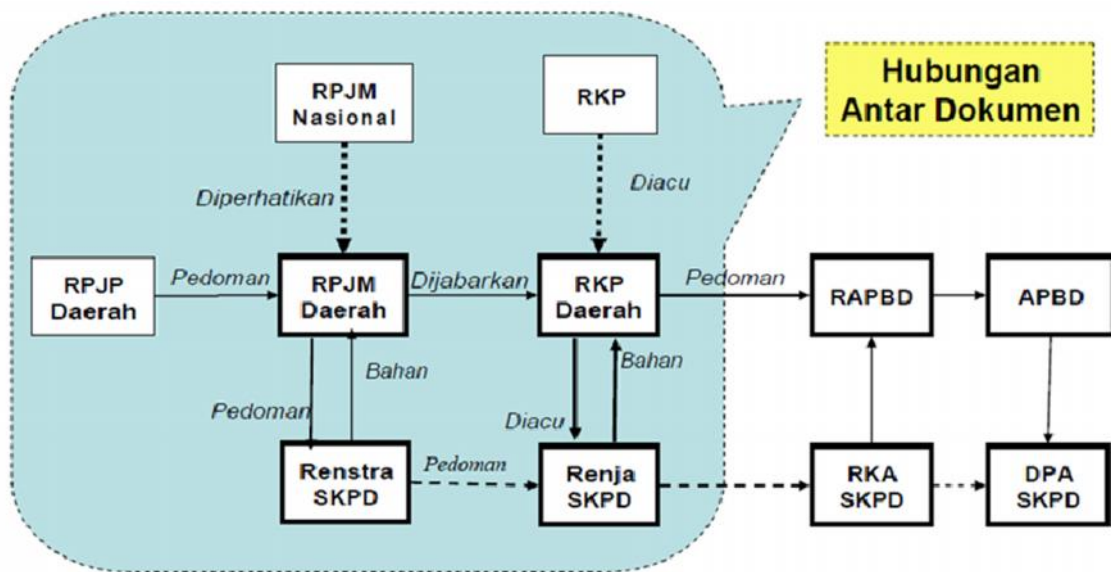
f. Penetapan Renja.

Skema hubungan perencanaan dan penganggaran seperti terlihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 2. Bagan alur hubungan perencanaan dan penganggaran

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erta antara satu dengan lainnya.



Gambar 3. Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan);
22. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1).
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 30);
27. Rancangan awal RKPD tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun berdasarkan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan isu strategis di bidang Urusan Lingkungan Hidup, selain itu untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan evaluasi

agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021 untuk memetakan kebutuhan Di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang urusan Lingkungan Hidup serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Renja antara lain; Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Pembahasan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan.

BAB IV .RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V. PENUTUP

Lampiran.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capain

Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2019) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2019 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - Pemantauan Kualitas Udara
 - Pengelolaan Limbah B3
 - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:
 - Pemantauan Kualitas Air
 - Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah (Properda)
 - Inventarisasi Kerusakan Sumber Daya Alam
 - Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam
 - Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3
 - Pengelolaan Persampahan
 - Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3
 - Penjaminan Pengelolaan Limbah B3
 - Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup
 - Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 - Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
 - Pemberian Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup
 - Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan
 - Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim
 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS dan RPPLH Provinsi/Kab/Kota di Sulawesi Selatan
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Pengadaan perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
 - Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
 - Pengumpulan dan publikasi data dan informasi OPD
 - Penyusunan dan pengelolaan administrasi
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:
- Pembinaan, dan pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Pembinaan Adipura dan Kalpataru
 - Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup
 - Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup
 - Penilaian dokumen lingkungan
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Faktor penghambat Pencapaian Kinerja
 - ❖ Terbatasnya alokasi anggaran untuk setiap kegiatan yang ditargetkan dalam Dokumen Perencanaan
 - ❖ Pada kegiatan Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup yaitu kurangnya konsultasi/koordinasi pada stakeholder, serta terdapat item belanja sertifikasi tidak terealisasi akibat pelaksanaan sertifikasi diundur ke tahun 2020 oleh Badan Sertifikasi Nasional secara sepihak.
 - ❖ Pada kegiatan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim yaitu terlambatnya data dari Kab/Kota
 - ❖ Pada Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan KLHS dan RPPLH Provinsi/Kab/Kota yaitu adanya penyusunan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) yang mewajibkan penyelenggaraan KLHS hamper di seluruh Kab/Kota.

- ❖ Pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yaitu adanya proses tender di item makan dan minum rapat, untuk pengumuman pemenang lelang yang terlalu lama, serta banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana karena jadwal kegiatan sudah tidak sesuai dengan perencanaan.
 - ❖ Pada kegiatan pengelolaan Limbah B3 yaitu adanya rasionalisasi belanja pengadaan solar, untuk belanja listrik tidak mencukupi dimana kebutuhan 1 bulan sebesar 30 juta sedangkan yang tersedia hanya 1 KPH anggarannya 1 juta, tidak terdapat sambungan pipa induk ke industri.
 - ❖ Pada kegiatan penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3 yaitu pengurangan tenaga outsourcing di 3 bulan terakhir.
 - ❖ Pada kegiatan Penjaminan Pengelolaan Limbah B3 terdapat belanja jasa K3 tidak terealisasi karena tumpang tindih antara manfaat dan asuransi mandiri yang dipotong dari gaji sehingga tidak terealisasi
- Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja
- ❖ Komitmen dari seluruh aparatur sipil Negara lingkup DPLH untuk merealisasikan target output dan outcomes dengan dukungan anggaran
 - ❖ Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dari pimpinan kepada bawahan lingkup DPLH
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain:
- ✚ Terselenggaranya pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
 - ✚ Meningkatnya pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat terkait urusan bidang lingkungan hidup
 - ✚ Terciptanya kualitas aparatur yang mempunyai kinerja baik
 - ✚ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bidang lingkungan hidup
 - ✚ Terwujudnya lingkungan hidup yang nyaman dan berkelanjutan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
- ✚ Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
 - ✚ Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM agar lebih kompeten sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian output dan outcomes.
 - ✚ Membuat agenda kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.00	00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%					100%	100%	100
0.00	00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah tenaga non PNS yang diadakan Cakupan ketersediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Tenaga Non PNS yang diadakan	21 Orang					20 Orang	20 Orang	95,24
0.00	00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang Tersedia Cakupan Ketersediaan ATK Jumlah ATK yang tersedia	50 Jenis ATK					50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	100,00
0.00	00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat atau pertemuan yang disediakan makanan dan	200 Rapat					200 Rapat	200 Rapat	100

					minumannya.								
					Cakupan Ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat								
					Jumlah Kegiatan Rapat atau Pertemuan yang disediakan makan dan minumannya								
0.00	00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	30 Kali					55 Kali	55 Kali	183,33
					Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas								
					Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang difasilitasi								
0.00	00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%					100%	100%	100
0.00	00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 Unit					100 Unit	100 Unit	100
0.00	00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan kantor yang dipelihara	62 Jenis					62 Jenis	62 Jenis	100
					Cakupan Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan kantor								

					Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang diadakan								
					Ketersediaan bahan bakar minyak/gas kendaraan dinas dan operasinal kantordan operasional kantor	24216 Liter					12748 Liter	12748 Liter	52,64
					Jumlah Bahan bakar minyak/gas untuk kendaraan dinas dan operasional kantor								
0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%					100%	100%	100
0.00	00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum PD	100 Orang					100 Orang	100 Orang	100
					Cakupan Kabupaten/kota yang Melaksanakan Forum Perangkat Daerah Lh								
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Forum Pd								
0.00	00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	8 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	100
					Cakupan Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pd setiap Triwulan								
					Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan								

0.00	00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	4 Jenis					4 Jenis	4 Jenis	100
					Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan								
					Jumlah Data dan Informasi yang Terpublikasi								
0.00	00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan					3 Laporan	3 Laporan	100
					Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan Pd								
					Jumlah Laporan Administrasi Keuangan								
1.02	05	01		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	38 %					21.70 %	21.70 %	57,11
					Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	20 %					20 %	20 %	100
					Indeks kualitas udara (Prioritas)	88.68					88.69 %	88.69 %	100,01
					Indeks kualitas air (Prioritas)	77.63					81.47 %	81.47 %	104,95
1.02	05	01	001	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah sungai dan danau yang diketahui status kualitas airnya	18 Sungai dan 2 Danau					18 Sungai	18 Sungai	90
					Termanfaatnya Hasil Pemantauan Kualitas Air untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan								

					Jumlah Sungai dan Danau yang diketahui Status Kualitas Airnya								
1.02	05	01	002	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah kab/kota yang dipantau status mutu udaranya	13 Kab./kota					11 Kab./kota	11 Kab./kota	84,62
					Termanfaatnya Hasil Pemantauan Kualitas Udara untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan								
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau Status Kualitas Udaranya								
1.02	05	01	004	Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi	55 Usaha dan/atau Kegiatan					57 Usaha Dan/atau Kegiatan	57 Usaha Dan/atau Kegiatan	103,64
					Persentase Tingkat Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh dan Puulh								
					Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi tingkat ketaatan terhadap izin lingkungan, Izin Pplh dan Puulh								
1.02	05	01	005	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang di awasi ketaatannya terhadap	10 Usaha dan/atau Kegiatan					10 Usaha Dan/atau Kegiatan	10 Usaha Dan/atau Kegiatan	100

				di Daerah (PROPERDA)	izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi								
					Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh dan Izin Puulh								
					Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi tingkat ketaatan terhadap izin lingkungan, Izin Pplh dan Puulh yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi								
1.02	05	01	006	Inventarisasi kerusakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	10 Lokasi					10 Lokasi	10 Lokasi	100
					Cakupan Kab/Kota yang diinventarisasi kerusakan sumber daya alamnya								
					Jumlah Kab/Kota yang di Inventarisasi Kerusakan Sumber Daya Alamnya								
1.02	05	01	007	Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi yang dipulihkan sumber daya alamnya	1 Lokasi					1 Lokasi	1 Lokasi	100
					Cakupan lokasi yang di pulihkan dari total lokasi yang telah di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya								

					Jumlah Lokasi yang di Pulihkan Sumber Daya Alamnya								
1.02	05	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota	46 %					46 %	46 %	100
					Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	75 %				75 %	75 %	100	
1.02	05	02	001	Pengembangan Fasilitas Tekhnis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3	10 Lokasi					10 Lokasi	10 Lokasi	100
					Cakupan Lokasi Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3								
					Jumlah Lokasi Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3								
1.02	05	02	002	Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pemanfaatan dan Pengelolaan LB3	100 Perusahaan					100 Perusahaan	100 Perusahaan	100
					Jumlah Limbah B3 yang dikelola oleh Pemrakarsa Usaha/kegiatan di Sulawesi Selatan								
					Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pemanfaatan dan Pengelolaan LB3								
1.02	05	02	003	Pembinaan Adipura dan Kalpataru	Jumlah Kab/kota yang dibina untuk penilaian Adipura dan Kalpataru	15 Kabupaten					20 Kabupaten	20 Kabupaten	133,33
					Cakupan Kab/kota yang Mendapatkan								

					Penghargaan Adipura dan Kalpataru								
					Jumlah Kab/Kota yang Dibina								
1.02	05	02	004	Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	24 Kabupaten					24 Kabupaten	24 Kabupaten	100
					Presentase Jumlah Sampah yang Tangani di Sulawesi Selatan								
					Jumlah Kab/Kota yang Dibina Dalam Pengelolaan Persampahan								
1.02	05	02	005	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	448 Ton					62.63 Ton	62.63 Ton	13,98
					Peresentase limbah B3 terhadap total limbah B3 yang dikelola hingga akhir periode renstra								
					Jumlah Limbah B3 yang dikelola								
1.02	05	02	006	Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan Limbah B3	7 Jenis					7 Jenis	7 Jenis	100
					Cakupan ketersediaan pelayanan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3								
					Jumlah Pelayanan Ketatusahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3								

1.02	05	02	007	Penjaminan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	3 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	100
					Cakupan ketersediaan dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3								
					Jumlah Dokumen Penjaminan Pengelolaan Limbah B3								
1.02	05	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	100 %					120 %	120 %	120
1.02	05	03	001	Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah PAD yang dihasilkan dari jasa Laboratorium Lingkungan	600.000.000					730.440.000	730.440.000	121,74
					Meningkatnya Jumlah PAD								
					Jumlah PAD Yang Dihasilkan Dari Jasa Laboratorium Lingkungan Hidup								
1.02	05	03	002	Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter yang Ter Akreditasi	4 Parameter					4 Parameter	4 Parameter	100
					Peningkatan Parameter Yang Ter Akreditasi								
					Jumlah Parameter yang Ter Akreditasi								
1.02	05	03	003	Pelayanan dan Pengujian	Jumlah sampel yang diuji	750 Sampel					1.198 Sampel	1.198 Sampel	159,73

				Laboratorium Lingkungan Hidup	Peningkatan Jumlah Sampel Yang Diuji								
					Jumlah Sampel yang Diuji								
1.02	05	04		PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %					100 %	100 %	100
					Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	24 kab/kota					24 kab/kota	24 kab/kota	100
1.02	05	04	001	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi tindak lanjut Kasus/Perkara LH yang ditangani	10 Rekomendasi					10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100
					Presentase Jumlah Kasus/perkara Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti								
					Jumlah rekomendasi tindak lanjut kasus/perkara Lingkungan Hidup ditangani								
1.02	05	04	002	Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	10 Rekomendasi					10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100
					Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi,								

					Lokasi Usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani								
					Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Puh Lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kab/kota yang ditangani								
1.02	05	04	005	Pemberian Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima penghargaan lingkungan hidup	40 Sekolah					40 Sekolah	40 Sekolah	100
					Presentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup								
					Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup								
1.02	05	04	007	Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	10 Mha dan Kearifan Lokal					10 Mha dan Kearifan Lokal	10 Mha dan Kearifan Lokal	100
					Cakupan Jumlah MHA dan Kearifan Lokal yang diverifikasi								
					Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi								
1.02	05	05		PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	Cakupan penilaian dokumen lingkungan	100 %					40 %	40 %	40

					kabupaten/kota								
					Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca	5 Kab/Kota					5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100
1.02	05	05	002	Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	5 Lokasi					5 Lokasi	5 Lokasi	100
					Cakupan Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim								
					Jumlah lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim								
1.02	05	05	004	Pembinaan dan Pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kabupaten/Kota/Prov. Sulawesi selatan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam Pelaksanaan KLHS dan RPPLH	24 kab/kota					24 kab/kota	24 kab/kota	100
					Cakupan Laporan Klhs yang tervalidasi dan terintegrasi dengan baik dalam Dokumen Perencanaan								
					Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS dan RPPLH								
1.02	05	05	005	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
					Cakupan ketersediaan Dokumen Rencana Pemanfaatan Kehati								

					Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati									
1.02	05	05	006	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di Nilai	7 Dokumen					30 Dokumen	30 Dokumen	428,57	
					Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai layak dikeluarkan rekomendasinya									
					Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indicator kinerja yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPLH periode 2018-2023.

Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	% Peningkatan indeks kualitas air			73.24	0.28 %	0.17 %	0.95 %	NA	0.28 %	0.17 %	0.95 %	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020 memakai nilai Persentase dan angka target
	% Penegakan hukum lingkungan hidup			0.79	32 %	46 %	62 %		32 %	46 %	62 %	
	% Penurunan beban pencemaran udara sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)			Juta Ton CO2eq (2017)	38 %	41 %	44 %		38 %	41 %	44 %	
	% Peningkatan lokasi kerusakan Lingkungan yang dipulihkan				20 %	40 %	60 %		20 %	40 %	60 %	
	% Peningkatan indeks kualitas udara				0.02 %	0.03 %	0.05 %		0.02 %	0.03 %	0.05 %	
2	% Nilai SAKIP OPD			B	90 %	91 %	92 %	NA	90 %	91 %	92 %	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020

												memakai nilai Persentase dan angka target
3	% Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah		B	94.48 %	95 %	96 %	NA	94.48 %	95 %	96 %		
4	% Peningkatan volume limbah B3 yang dikelola (sludge, fly ash, bottom ash) % Pengurangan Timbulan Sampah % Penanganan Timbulan Sampah		73.24 0.79 Juta Ton CO2eq (2017)	83 % 20 % 80 %	87 % 22 % 75 %	91 % 24 % 74 %	NA	83 % 20 % 80 %	87 % 22 % 75 %	91 % 24 % 74 %		Realisasi 2019 dan proyeksi 2020 memakai nilai Persentase dan angka target
5	% Cakupan Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim % Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya % Cakupan Laporan KLHS yang tervalidasi dan terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan		73.24 0.79 Juta Ton CO2eq (2017)	16.67 % 40 % 40 %	20.8 % 60 % 60 %	25 % 80 % 80 %	NA	16.67 % 40 % 40 %	20.8% 60% 60%	25 % 80 % 80 %		Realisasi 2019 dan proyeksi 2020 memakai nilai Persentase dan angka target

6	% ASN Nilai SKP Kategori Baik			B	81 %	82 %	83 %	NA	81 %	82 %	83 %	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020 memakai nilai Persentase dan angka target
7	Jumlah Masyarakat adat bersama pengetahuan dan kearifan lokalnya yang dilibatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			73.24 0.79 Juta Ton CO ₂ eq (2017)	2 MHA dan KL	2 MHA dan KL	3 MHA dan KL	NA	2 MHA dan KL	2 MHA dan KL	3 MHA dan KL	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020 memakai nilai Persentase dan angka target
8	% Keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan			73.24 0.79 Juta Ton CO ₂ eq (2017)	100 %	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	100 %	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020 memakai nilai Persentase dan angka target

Ket NA = Not Available

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat mempresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Pencapaian indikator Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. .Pengukuran Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya efektifitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		65,45	75,50	115,35
	% Peningkatan Indeks Kualitas Air	%	0,28%	0,38%	135,71
	% Peningkatan Indeks Kualitas Udara	%	0,02%	0,02%	100
	% Peningkatan lokasi kerusakan Lingkungan yang dipulihkan	%	20%	20%	100
	% Penurunan beban pencemaran air sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)	%	38%	45,83%	120,6
	% Penurunan beban pencemaran udara sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)	%	38%	43,62%	114,78
	% Peningkatan Ketaatan Pemrakarsa Usaha	%	47%	60%	12,76
	% penanganan	%	32%	64%	200

	pengaduan dan sengketa lingkungan				
	% Penegakan hukum lingkungan hidup	%	32%	64%	200
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah	% Peningkatan volume limbah B3 yang dikelola	%	83%	13,98%	16.84
	% pengurangan timbulan sampah	%	20%	4,73%	23,65
	% Penanganan Timbulan Sampah	%	80%	0,1%	0,1
3. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	% Cakupan Laporan KLHS yang tervalidasi dan Terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan	%	40%	13,7%	34,25
	% Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya	%	40%	20%	50
	% Cakupan Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	%	16,67%	20,83%	125
4. Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat adat bersama pengetahuan dan kearifan lokalnya yang dilibatkan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup		2 MHA dan KL	2 MHA dan KL	100
5. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup	% Keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, prasarana	%	100%	100%	100

	aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan				
6. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	% Nilai SAKIP OPD	%	90%	65,14%	72,38
	% Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	%	94,48%	100%	105,84
	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	%	81%	99%	122,22
Rata-Rata Capaian					90,86

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator adalah 90,86 yang dikategorikan baik,

Berdasarkan Pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, maka jumlah anggaran yang dibelanjakan untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp.19.817.564.768, sementara pagu yang tersedia sejumlah Rp. 20.604.920.932,37 atau persentase penyerapan anggaran sebesar 96,17%.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai unit pelayanan yang memberikan nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari pelayanan pengujian laboratorium dan pengelolaan limbah B3 dari Fasilitas pelayanan Kesehatan. UPTD Pelayanan Pengujian Laboratorium DPLH pada tahun 2019 mempunyai target PAD senilai Rp.600.000,- dan PAD yang terealisasi senilai Rp.730.440.000,- atau tercapai sebesar 121,74%. Pada UPT Pengelolaan Limbah B3 dari target awal senilai Rp 1.257.784.026 dengan jumlah target limbah B3 yang dikelola sebesar 448 Ton hanya terealisasi sebesar 62,63 Ton atau PAD yang tercapai mengalami penurunan dari target yaitu senilai 976.614.450 atau sebesar 62.63 ton atau sebesar 77,64%.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pengujian yang melakukan pengujian sampel uji kualitas lingkungan di UPT Pengelolaan Laboratorium Pengujian DPLH Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPT, hal ini berguna bagi UPT untuk dijadikan pedoman kebijakan, dan strategi dalam meningkatkan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 melalui kuisioner yang disebar kepada responden menunjukkan

bahwa nilai IKM UPT Laboratorium Penguji mempunyai nilai rata-rata 81,5 atau berkategori sangat baik dalam memberikan mutu pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Visi pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 sebagaimana yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah “ Sulawesi Selatan yang inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mendukung visi di atas berada pada makna inklusif yang berarti kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayahserta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi, sedangkan misi untuk mendukung terwujudnya visi berada pada misi ke lima yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang berkelanjutan dengan program prioritas daerah “perbaikan tata Kelola Sumber daya Alam dengan memperhatikan daya dukung Lahan”. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2015-2019 dengan mengusung peran utama Kinerja Kementerian yaitu:

- Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, Keanekaragaman Hayati serta pengendalian perubahan iklim.
- Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan social, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah maupun jenis flora dan fauna serta *endangered spesies*.
- Memelihara Kualitas Lingkungan Hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam.

Sinergitas sasaran strategis Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten serta Kota berada pada sasaran strategis pertama dengan menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beradapada kisaran 66,5 – 68,6 sedangkan pada capaian renstra akhir periode 2013-2018 dengan sasaran Meningkatkan Upaya dan Kapasitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada range 62-65 sedangkan pada tahun 2019 capaian realisasi IKLH berada pada nilai 75,50.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program Kepala daerah periode 2018-2023 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur
dan Wakil Gubernur

Visi:” Sulawesi Selatan yang inovatif, Produktif,Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan Program: “ Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Daya Dukung Lahan”.	1.Minimnya data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup 2. Kurangnya sinergitas terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah terkait. 3. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	1.Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. 2.Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersinggungan dengan sektor lain	1.Komitmen Kepala Daerah dalam mengawal pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan. 2. Regulasi yang tegas dalam menjaga kualitas lingkungan. 3. Inovasi terkait pengelolaan lingkungan. 4. Tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang memadai dan Pengendali Dampak Lingkungan.

Selain itu mencermati permasalahan pencapaian kinerja pembangunan daerah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa hal yang terkait dinamiika eksternal yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Isu strategis merupakan hal yang bersifat penting sangat mendasar dan strategis yang perlu mendapat perhatian dalam jangka panjang Adapun isu strategis yang menjadi perhatian salah satunya adalah isu terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan mempengaruhi keseimbangan ekosistem serta semakin banyaknya rumah kaca mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Terkait isu Nasional mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.

Ketiga krisis ini menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, termasuk menurunnya kesehatan masyarakat.

Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Selain itu, kemajuan diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya alam daratan dan sumber daya kelautan, dimana sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian nasional cukup besar dan merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan jangka panjang juga menghadapi tantangan dengan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga diperlukan berbagai penelitian, perlindungan dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI), oleh karena itu penyelamatan ekosistem beserta flora dan fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Indonesia.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 menitikberatkan kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir, dimana kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan yang terjadi di hulu (DAS). Selain itu kawasan hutan mangrove berkurang dengan cepat karena dikonversi menjadi kawasan pertambakan atau untuk kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan hutan mangrove selain memengaruhi kualitas habitat perairan yang pada umumnya bernilai ekonomis tinggi juga meningkatkan potensi abrasi

akibat gelombang dan pasang air laut, serta akan semakin diperparah oleh kemungkinan kenaikan muka laut akibat pemanasan global. Erosi yang berkepanjangan pada hampir semua sungai besar maupun kecil juga menimbulkan dampak negatif pada kawasan pesisir, antara lain berupa proses sedimentasi (pendangkalan perairan pelabuhan) dan kualitas pengairan tambak. Menurunnya kualitas lingkungan pada semua DAS dan mayoritas kawasan pesisir yang ada di Sulawesi Selatan, terutama disebabkan oleh semakin maraknya pembukaan lahan yang semakin tidak terkendali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh kalangan pengusaha menengah dan besar. Sesuai dengan kebijakan nasional, setiap produk kebijakan terkait lingkungan di Provinsi Sulawesi selatan dipastikan berpedoman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh kebijakan yang dibuat akan berpedoman pada paradigma pembangunan menurut konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan hasil telaahan di atas dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra DPLH Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan : (1) tingginya kerusakan sumberdaya alam pada ekosistem hutan, sungai, permukiman, dan pesisir.
- b. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban pencemaran berbasis DAS; (2) meningkatnya emisi ke udara ambient.
- c. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019 terhadap analisis kebutuhan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran pagu anggaran yang diajukan dinilai masih dirasa kurang untuk membiayai kegiatan operasional Dinas hal ini disebabkan kemungkinan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel TC.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)		(12)		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)		% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	44 %	936.750.015,95	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)		% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	47 %	943.823.873,0			
			Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	20 %					Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan		20 %		
			Indeks kualitas udara (Prioritas)	88.75					Indeks kualitas udara (Prioritas)		88.8		
			Indeks kualitas air (Prioritas)	77.72					Indeks kualitas air (Prioritas)		77.78		

	Pemantauan Kualitas Air	Danau Matano, Danau Tempe, Sungai Tallo, Sungai Maros, Sungai Jeneberang, Sungai Pangkajene, Sungai Sigeri, Sungai Kalibone, Sungai Taman Roy, Sungai Pappa, Sungai Karajae, Sungai Bila, Sungai Kelara, Sungai Kariango, Sungai Saddang, Sungai Tino, Sungai Awo, Sungai Walanae, Sungai Lamasi, Sungai Pareman, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, Sungai Tangka, Sungai Tarumpakkae Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sungai dan danau yang diketahui status kualitas airnya	22 Sungai dan 2 Danau	175.000.000,0	Pemantauan Kualitas Air	Danau Matano, Danau Tempe, Sungai Tallo, Sungai Maros, Sungai Jeneberang, Sungai Pangkajene, Sungai Sigeri, Sungai Kalibone, Sungai Taman Roy, Sungai Pappa, Sungai Karajae, Sungai Bila, Sungai Kelara, Sungai Kariango, Sungai Saddang, Sungai Tino, Sungai Awo, Sungai Walanae, Sungai Lamasi, Sungai Pareman, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, Sungai Tangka, Sungai Tarumpakkae Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sungai dan danau yang diketahui status kualitas airnya	24 Sungai dan 2 Danau	175.000.000,0	
--	-------------------------	--	---	-----------------------	---------------	-------------------------	--	---	-----------------------	---------------	--

	Pemantauan Kualitas Udara	Makassar, Maros, Pangkajene, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Pinrang, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu, Sidrap, Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kab/kota yang dipantau status mutu udaranya	17 Kab/kota	100.000.000,0	Pemantauan Kualitas Udara	Makassar, Maros, Pangkajene, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Pinrang, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu, Sidrap, Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kab/kota yang dipantau status mutu udaranya	20 Kab/kota	100.000.000,0	
	Pemantauan kualitas tanah	Enrekang, Toraja, Maros Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lokasi pemantauan kualitas tanah	3 Kab/kota	75.000.000,0	Pemantauan kualitas tanah	Enrekang, Toraja, Maros Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah lokasi pemantauan kualitas tanah	3 Kab/kota	75.000.000,0	

	Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Kepulauan Selayar,Kab. Bulukumba,Kab. Bantaeng,Kab. Jeneponto,Kab. Takalar,Kab. Gowa,Kab. Sinjai,Kab. Bone,Kab. Maros,Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Barru,Kab. Soppeng,Kab. Wajo,Kab. Sidenreng Rappang,Kab. Pinrang,Kab. Enrekang,Kab. Luwu,Kab. Tana Toraja,Kab. Luwu Utara,Kab. Luwu Timur,Kab. Toraja Utara,Kota Makassar,Kota Parepare,Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi	65 Usaha dan/atau kegiatan	236.750.015,95	Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Kepulauan Selayar,Kab. Bulukumba,Kab. Bantaeng,Kab. Jeneponto,Kab. Takalar,Kab. Gowa,Kab. Sinjai,Kab. Bone,Kab. Maros,Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Barru,Kab. Soppeng,Kab. Wajo,Kab. Sidenreng Rappang,Kab. Pinrang,Kab. Enrekang,Kab. Luwu,Kab. Tana Toraja,Kab. Luwu Utara,Kab. Luwu Timur,Kab. Toraja Utara,Kota Makassar,Kota Parepare,Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi	70 Usaha dan/atau kegiatan	243.823.873,0	
	Inventarisasi kerusakan Sumber Daya Alam	SULAWESI SELATAN	Jumlah Kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	10 Lokasi	100.000.000,0	Inventarisasi kerusakan Sumber Daya Alam	SULAWESI SELATAN	Jumlah Kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	10 Lokasi	100.000.000,0	
	Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam	Sulawesi Selatan	Jumlah lokasi yang dipulihkan sumber daya alamnya	1 Lokasi	200.000.000,0	Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam	Sulawesi Selatan	Jumlah lokasi yang dipulihkan sumber daya alamnya	1 Lokasi	200.000.000,0	

	Pemantauan Kualitas Air Laut	Sulawesi Selatan	Jumlah Laut yang diketahui Kualitas Status Mutunya	4 Laut	50.000.000,0	Pemantauan Kualitas Air Laut	Sulawesi Selatan	Jumlah Laut yang diketahui Kualitas Status Mutunya	4 Laut	50.000.000,0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3		% Penanganan Sampah Kab./Kota	50 %	5.364.744.562,72	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3		% Penanganan Sampah Kab./Kota	52 %	5.434.591.668,92	
			Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	90 %				Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	95 %		
	Pengembangan Fasilitas Tekhnis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3	5 Lokasi	770.944.108,0	Pengembangan Fasilitas Tekhnis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3	5 Lokasi	788.315.879,0	
	Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3	Sulawesi Selatan	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pemanfaatan dan Pengelolaan LB3	150 Perusahaan	947.933.491,0	Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3	Sulawesi Selatan	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pemanfaatan dan Pengelolaan LB3	175 Perusahaan	965.305.262,0	
	Pembinaan Adipura dan Kalpataru	24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/kota yang dibina untuk penilaian Adipura dan Kalpataru	15 Kab/kota	397.933.491,0	Pembinaan Adipura dan Kalpataru	24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/kota yang dibina untuk penilaian Adipura dan Kalpataru	15 Kab/kota	415.305.262,0	
	Pengelolaan Persampahan	SULAWESI SELATAN	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	24 Kab/kota	497.933.491,0	Pengelolaan Persampahan	SULAWESI SELATAN	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	24 Kab/kota	515.305.262,0	

	Pengelolaan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	500 ton	1.989.999.981,72	Pengelolaan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	550 ton	1.930.360.003,92	
	Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan Limbah B3	7 Jenis	590.000.000,0	Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan Limbah B3	7 Jenis	630.000.000,0	
	Penjaminan Pengelolaan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	3 Dokumen	170.000.000,0	Penjaminan Pengelolaan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	Jumlah dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	3 Dokumen	190.000.000,0	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	100 %	476.484.313,87	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	100 %	482.687.973,0	
	Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	SULAWESI SELATAN	Jumlah PAD yang dihasilkan dari jasa Laboratorium Lingkungan	650000000 Rupiah	210.484.313,87	Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	SULAWESI SELATAN	Jumlah PAD yang dihasilkan dari jasa Laboratorium Lingkungan	700000000 Rupiah	213.687.973,0	

	Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Parameter yang Ter Akreditasi	60 Parameter	136.000.000,0	Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Parameter yang Ter Akreditasi	65 Parameter	137.000.000,0	
	Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah sampel yang diuji	1100 sampel	130.000.000,0	Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah sampel yang diuji	1150 sampel	132.000.000,0	
	PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	687.907.433,26	PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	701.986.050,26	
			Jumlah Kab./Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	24 kab/kota				Jumlah Kab./Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	24 kab/kota		
	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi tindak lanjut Kasus/Perkara LH yang ditangani	14 Rekomendasi	68.000.000,0	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi tindak lanjut Kasus/Perkara LH yang ditangani	16 Rekomendasi	69.000.000,0	

Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi, Lokasi Usaha dan dampak lintas Kab./kota yang ditangani	14 Rekomendasi	68.000.000,0	Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi, Lokasi Usaha dan dampak lintas Kab./kota yang ditangani	16 Rekomendasi	69.000.000,0	
Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/kota dan sekolah yang dibina	110 Sekolah dan Kab/kota	229.373.580,0	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/kota dan sekolah yang dibina	120 Sekolah dan Kab/kota	230.373.580,0	
Pemberian Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Penerima penghargaan lingkungan hidup	60 Sekolah	110.000.000,0	Pemberian Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	Jumlah Penerima penghargaan lingkungan hidup	80 Sekolah	114.000.000,0	
Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	Sulawesi Selatan	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengtahuan Tradisional yang diverifikasi	20 MHA dan Kearifan Lokal	131.592.747,0	Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	Sulawesi Selatan	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengtahuan Tradisional yang diverifikasi	20 MHA dan Kearifan Lokal	132.495.237,0	
Pembinaan dan Penerapan Ekolabel, Teknologi Ramah Lingkungan	Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam penerapan ekolabel dan teknologi ramah lingkungan	6 Produk	80.941.106,26	Pembinaan dan Penerapan Ekolabel, Teknologi Ramah Lingkungan	Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam penerapan ekolabel dan teknologi ramah lingkungan	7 Produk	87.117.233,26	

PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN		Cakupan penilaian dokumen lingkungan Kab./kota	100 %	793.842.730,75	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN		Cakupan penilaian dokumen lingkungan Kab./kota	100 %	804.178.286,69	
			15 Kab/Kota					20 Kab/Kota		
		Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca					Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca			
Koordinasi Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)	SULAWESI SELATAN	Jumlah Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas Rumah kaca (GRK)	1 Dokumen	300.000.000,0	Koordinasi Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)	SULAWESI SELATAN	Jumlah Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas Rumah kaca (GRK)	1 Dokumen	302.500.000,0	
Pembinaan dan Pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kab./Kota/Prov. Sulawesi selatan	SULAWESI SELATAN	Jumlah kab/kota yang dibina dalam Pelaksanaan KLHS dan RPPLH	24 Kab/Kota	230.000.000,0	Pembinaan dan Pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kab./Kota/Prov. Sulawesi selatan	SULAWESI SELATAN	Jumlah kab/kota yang dibina dalam Pelaksanaan KLHS dan RPPLH	24 Kab/Kota	235.678.286,69	
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	SULAWESI SELATAN	Dokumen rencana pemanfaatan keaneekaragaman hayati.	1 Dokumen	151.500.000,0	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	SULAWESI SELATAN	Dokumen rencana pemanfaatan keaneekaragaman hayati.	1 Dokumen	152.500.000,0	

	Penilaian Dokumen Lingkungan	SULAWESI SELATAN	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di Nilai	7 Dokumen	112.342.730,75	Penilaian Dokumen Lingkungan	SULAWESI SELATAN	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di Nilai	7 Dokumen	113.500.000,0	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	1.770.211.980,39	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	1.793.259.523,99	
	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Kantor DPLH Kota Makassar	Jumlah tenaga non PNS yang diadakan	21 orang	718.200.000,0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Kantor DPLH Kota Makassar	Jumlah tenaga non PNS yang diadakan	21 orang	718.200.000,0	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah ATK yang Tersedia	70 Jenis ATK	250.000.000,0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah ATK yang Tersedia	80 Jenis ATK	250.000.000,0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 Unit	20.000.000,0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 Unit	20.000.000,0	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Makassar	Jumlah kegiatan rapat atau pertemuan yang disediakan makanan dan minumannya.	260 Rapat	350.000.000,0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Makassar	Jumlah kegiatan rapat atau pertemuan yang disediakan makanan dan minumannya.	270 Rapat	350.000.000,0	

	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Kota Makassar	Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti	1 Pameran	182.011.980,39	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Kota Makassar	Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti	1 Pameran	155.059.523,99	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	SULAWESI SELATAN DAN JAWA	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	45 Kali	250.000.000,0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	SULAWESI SELATAN DAN JAWA	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	50 Kali	300.000.000,0	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	362.045.877,45	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	366.759.588,71	
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kendaran dinas dan operasional kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	30000 Liter 62 jenis	45.354.877,45	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kendaran dinas dan operasional kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	35000 Liter 62 jenis	50.068.588,71	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kota Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 unit	316.691.000,0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kota Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 unit	316.691.000,0	

	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA		% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	460.564.739,30	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA		% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	466.561.131,84	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum PD	100 orang	30.000.000,0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum PD	100 orang	30.000.000,0	
	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	SULAWESI SELATAN	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	8 Dokumen	30.000.000,0	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	SULAWESI SELATAN	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	8 Dokumen	30.000.000,0	
	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Kota Makassar	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	50.000.000,0	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Kota Makassar	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	50.000.000,0	
	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Sulawesi Selatan	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	4 Jenis	157.064.739,30	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Sulawesi Selatan	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	4 Jenis	158.061.131,84	
	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	91.500.000,0	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	91.500.000,0	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	100.000.000,0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	105.000.000,0	

	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor DPLH Kota Makassar	Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	4 Laporan	2.000.000,0	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor DPLH Kota Makassar	Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	4 Laporan	2.000.000,0	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		% ASN berkinerja sangat baik	100 %	129.926.861,69	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		% ASN berkinerja sangat baik	100 %	131.618.464,18	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Kantor DPLH Kota Makassar	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Pasang	65.000.000,0	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Kantor DPLH Kota Makassar	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Pasang	65.000.000,0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kantor DPLH Kota Makassar	Jumlah ASN yang diadakan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu.	110 ASN	64.926.861,69	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kantor DPLH Kota Makassar	Jumlah ASN yang diadakan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu.	115 ASN	66.618.464,18	
					10.982.478.515,38						11.125.466.560,59

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan prinsip Tata kelola Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dan dengan memperhatikan hasil pelaksanaan MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Kabupaten dan selanjutnya dibahas di tingkat Provinsi serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, efisiensi dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan, dengan demikian diharapkan rencana Kerja tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan urusan Lingkungan Hidup sepanjang anggaran tersedia dan mampu mengakomodir program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan Rencana Kerja dibahas dalam forum OPD Pemerintah Provinsi. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Kerja (Renja) dengan kesepakatan hasil Musrenbang Kabupaten. Pada forum OPD tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang ditujukan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tugas dan Fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Usulan yang disampaikan pada forum OPD terkait dengan prioritas program dan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 memiliki empat pilar agenda kerja yaitu:

- Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan)
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi)
- Fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial)
- Tata Kelola dan Inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata Kelola).

Untuk pilar lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran sebagai berikut:

- Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75 -78 yang pada tahun sebelumnya (2018) berada di angka 71,67.
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27 % dari 24,7% pada tahun 2017.
- Penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018.
- Indeks Kinerja Pengelolaan sampah sebesar 80
- Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap Ketahanan Pangan dan ketangguhan Bencana sebanyak 108 DAs serta rehabilitasi seluas 1,5 juta Ha
- Perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pada pilar ekonomi termasuk pengembangan 15 kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional, sedangkan pada pilar tata kelola KLHK akan merencanakan memperkuat Kualitas kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan diterapkan untuk diintegrasikan secara nyata dalam agenda kerja

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Selain itu sasaran tata kelola ditujukan untuk peningkatan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan, penyelesaian 263 kasus bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta peningkatan PNBPN, selain itu integrasi satu sistem data dan informasi yang valid dan mudah untuk diakses. Pilar tata Kelola juga termasuk 100 produk hasil Litbang yang inovatif dan imlementatif, selain itu peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi, tata kelola keuangan yang baik serta penguatan SDM aparatur KLHK.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Sejalan dengan Visi Pemerintahan Daerah periode 2018-2023 adalah Sulawesi Selatan yang inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Untuk mewujudkan visi maka dibuat misi, adapun misi Pemerintah Provinsi ditetapkan 5 (lima) yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran. Misi pembangunan yang selaras dengan urusan bidang Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Adapun tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 maka tujuan yang hendak dicapai dalam urusan Lingkungan Hidup adalah Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah secara spesifik, terukur, kurun waktu yang pendek dari tujuan dengan indicator outcome yang terukur, dengan kata lain perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam). Tujuan/indikator yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- Tujuan jangka Menengah pelayanan DPLH : “ Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

- 🚩 Sasaran 1 “ Meningkatkan efektifitas pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

- ❖ Indikator Sasaran

- Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Air

- Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Udara
 - Persentase Peningkatan lokasi kerusakan Lingkungan yang dipulihkan
 - Persentase penurunan beban pencemaran air sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)
 - Persentase penurunan beban pencemaran udara sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)
 - Persentase Peningkatan Ketatan Pemrakarsa Usaha
 - Persentase penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan
 - Persentase penegakan hukum lingkungan hidup
- ✚ Sasaran 2 “ Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Timbulan Sampah”
- ❖ Indikator Sasaran
 - Persentase Peningkatan volume limbah B3 yang dikelola
 - Persentase pengurangan timbulan sampah
 - Persentase penanganan timbulan sampah
- ✚ Sasaran 3 “ Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan”
- ❖ Indikator Sasaran
 - Persentase cakupan laporan KLHS yang tervalidasi dan terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan
 - Persentase Cakupan dokumen lingkungan hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya
 - Persentase Cakupan lokasi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- ✚ Sasaran 4 “ Meningkatkan kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”
- ❖ Indikator Sasaran
 - Jumlah masyarakat adat bersama pengetahuan dan kearifan lokalnya yang dilibatkan dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup

✚ Sasaran 5 “ Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup”

❖ Indikator Sasaran

- Persentase keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan

✚ Sasaran 6 “ Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat daerah”

❖ Indikator Sasaran

- Persentase Nilai SAKIP OPD
- Persentase Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah
- Persentase ASN Nilai SKP berkategori baik

Tabel 5. Tujuan dan sasaran Pelayanan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021

NO	Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	2021
1.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah	1. Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	% Peningkatan Indeks Kualitas Air	0,95
				% Peningkatan Indeks Kualitas Udara	0,05
				% Peningkatan lokasi kerusakan Lingkungan yang dipulihkan	60%
				% Penurunan beban pencemaran	44%

				air sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)	
				% Penurunan beban pencemaran udara sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)	44%
				% Peningkatan Ketaatan Pemrakarsa Usaha	53%
				% penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan	62%
				% Penegakan hukum lingkungan hidup	62%
			2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah	% Peningkatan volume limbah B3 yang dikelola	91%
				% pengurangan timbulan sampah	24%
				% Penanganan Timbulan Sampah	74%
			3. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	% Cakupan Laporan KLHS yang tervalidasi dan Terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan	80%
				% Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya	80%
				% Cakupan	25%

				Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	
			4. Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat adat bersama pengetahuan dan kearifan lokalnya yang dilibatkan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	3 MHA dan KL
			5. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup	% Keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan	100%

2		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP OPD	% Nilai SAKIP OPD	92%
			1. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	% Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	96%
			% ASN Nilai SKP Kategori Baik	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	83%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja (*outcomes*) didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pencapaian visi pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tertera dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA DPLH adalah “ Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”, dalam visi tersebut kedudukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup berada pada makna ‘Inklusif’ yang berarti kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi serta DPLH dalam kedudukannya mendukung visi “inovatif” .

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki maka ditetapkan 5 (lima) misi dimana kedudukan DPLH berada pada Misi ke lima yaitu ‘meningkatkan produktivitas dan

daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dan mewujudkan Sulawesi Selatan yang nyaman dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran di atas maka akan dilaksanakan 9 program yang terdiri dari 1 program prioritas, dan 4 program penunjang, 4 program rutin dengan 44 kegiatan yang mengacu pada Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan antara lain:

- Pemantauan Kualitas Air,
- Pemantauan Kualitas Udara,
- *Pemantauan kualitas air laut,*
- *Pemantauan Kualitas Tanah,*
- Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- Inventarisasi kerusakan sumber daya alam
- Pemulihan kerusakan sumber daya alam.

2. Program Penataan Lingkungan

Kegiatan antara lain:

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Penilaian Dokumen Lingkungan
- Koordinasi Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS dan RPPLH Provinsi/Kab/Kota di Sulawesi Selatan

3. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Kegiatan antara lain:

- Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3
- Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Pengelolaan Persampahan

- Pengelolaan Limbah B3
- Pembinaan Adipura dan Kalpataru
- Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Limbah B3
- Penjaminan Pengelolaan Limbah B3

4. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan antara lain:

- Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan
- Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
- Pemberian Penghargaan di bidang Lingkungan Hidup
- Pembinaan dan Penerapan Ekolabel, teknologi Ramah Lingkungan

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup

Kegiatan antara lain:

- Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup
- Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium
- Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan antara lain:

- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak atau Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan antara lain:

- Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan kantor

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

8. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kegiatan antara lain:

- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
- Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK
- Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
- Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun,
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

9. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan antara lain:

- Pengadaan pakaian Dinas dan Pakaian Korpri beserta perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Hasil Kegiatan	Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5					6	7			8			9
1.02				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
1.02	05			Lingkungan Hidup												
1.02	05	01.00		Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup												
1.02	05	01.00	01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	44 %					936,750,015.95			47 %	943,823,873.0	
					Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	20 %								20 %		
					Indeks kualitas udara (Prioritas)	88.75								88.8		
					Indeks kualitas air (Prioritas)	77.72								77.78		

1.02	05	01.00	01	001	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah sungai dan danau yang diketahui status kualitas airnya	22 Sungai dan 2 Danau	Termanfaatkannya hasil pemantauan kualitas air untuk pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup	100 %	Danau Matano, Danau Tempe, Sungai Tallo, Sungai Maros, Sungai Jeneberang, Sungai Pangkajene, Sungai Sigeri, Sungai Kalibone, Sungai Taman Royo, Sungai Pappa, Sungai Karajae, Sungai Bila, Sungai Kelara, Sungai Kariango, Sungai Saddang, Sungai Tino, Sungai Awo, Sungai Walanae, Sungai Lamasi, Sungai Pareman, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, Sungai Tangka, Sungai Tarumpakkae Provinsi Sulawesi Selatan	175,000,000.0			24 Sungai dan 2 Danau	175,000,000.0
------	----	-------	----	-----	-------------------------	---	-----------------------	---	-------	---	---------------	--	--	-----------------------	---------------

1.02	05	01.00	01	002	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah kab/kota yang dipantau status mutu udaranya	17 Kab/kota	Termanfaatkannya hasil pemantauan kualitas udara untuk pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup	100 %	Makassar, Maros, Pangkajene, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Pinrang, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu, Sidrap, Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	# kec. masamba, kec. baeunta, kec. sukamaju, kec. bone e-bone Jl. Kiyai Haji Kasim Kasamad Bone Kec. Masamba	100,000,000.0			20 Kab/kota	100,000,000.0	
											#Jl. Jend. Sudirman. Jl. Persatuan Raya Kel. Biringere, Ruko Sentral Sinjai, Galery Sentral industri lappa North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi						
											#Kecamatan Sombaopu, Kecamatan Pallangga, dan Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan ID						

										#Mewakili pemukiman (perumahan area Pakkalarian Batili Kel. Galonta Kecamatan Enrekang Kab. Enrekang Regency South Sulawesi ID						
										#Pattalassan g Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan ID						
1.02	05	01.00	01	003	Pemantauan kualitas tanah	Jumlah lokasi pemantauan kualitas tanah	3 Kab/kota	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	100 %	Enrekang, Toraja, Maros Provinsi Sulawesi Selatan	#18 Kecamatan Wilayah Kab. Gowa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan ID	75,000,000.0			3 Kab/kota	75,000,000.0

1.02	05	01.00	01	004	Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi	65 Usaha dan/atau kegiatan	persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	50 %	Kabupaten Kepulauan Selayar,Kabupaten Bulukumba,Kabupaten Bantaeng,Kabupaten Jenepono,Kabupaten Takalar,Kabupaten Gowa,Kabupaten Sinjai,Kabupaten Bone,Kabupaten Maros,Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,Kabupaten Barru,Kabupaten Soppeng,Kabupaten Wajo,Kabupaten Sidenreng Rappang,Kabupaten Pinrang,Kabupaten Enrekang,Kabupaten Luwu,Kabupaten Tana Toraja,Kabupaten Luwu Utara,Kabupaten Luwu Timur,Kabupaten Toraja Utara,Kota Makassar,Kota Parepare,Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan	#Dinas Lingkungan Hidup Jl. Jend. Ahmad Yani km.6 Lapadde Ujung Pare-Pare City	236,750,015.95			70 Usaha dan/atau kegiatan	243,823,873.0
1.02	05	01.00	01	006	Inventarisasi kerusakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	10 Lokasi	Cakupan kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	60 %	SULAWESI SELATAN		100,000,000.0			10 Lokasi	100,000,000.0

1.02	05	01.00	01	007	Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi yang dipulihkan sumber daya alamnya	1 Lokasi	Cakupan lokasi yang dipulihkan dari total lokasi yang telah di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	60 %	Sulawesi Selatan		200,000,000.0			1 Lokasi	200,000,000.0
1.02	05	01.00	01	008	Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah Laut yang diketahui Kualitas Status Mutunya	4 Laut	Tercapainya Indeks Kualitas Air Laut	100	Sulawesi Selatan		50,000,000.0			4 Laut	50,000,000.0
1.02	05	01.00	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota	50 %					5,364,744,562.72			52 %	5,434,591,668.92
						Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	90 %								95 %	
1.02	05	01.00	02	001	Pengembangan Fasilitas Tekhnis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3	5 Lokasi	Cakupan Lokasi Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	66 %	SULAWESI SELATAN	#Pattalassang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan ID #Sekolah Adiwiyata Kec, Bulupoddo, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah dan Kec. Tellulimpoe Bulupoddo Sinjai Regency South Sulawesi	770,944,108.0			5 Lokasi	788,315,879.0
1.02	05	01.00	02	002	Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pemanfaatan dan Pengelolaan LB3	150 Perusahaan	Jumlah Limbah B3 Yang dikelola oleh Pemrakarsa Usaha/Kegiatan di Sulawesi Selatan	685000 Ton	Sulawesi Selatan		947,933,491.0			175 Perusahaan	965,305,262.0

1.02	05	01.00	02	003	Pembinaan Adipura dan Kalpataru	Jumlah Kab/kota yang dibina untuk penilaian Adipura dan Kalpataru	15 Kab/kota	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan Adipura dan Kalpataru	100 %	24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	#Lokasi Adipura : Kec. Biringkanaya, Kec. Tamalanrea, Kec. Panakkukang, Kec. Manggala, Kec. Rappocini, Kec. Tamalate, Kec. Bontoala, Kec. Tallo, Kec. Ujung Tanah, Kec. Makassar, Kec. Ujung Pandang dan Kec. Wajo. Lokasi Kalpataru : 1 Kelompok Masyarakat Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan	397,933,491.0			15 Kab/kota	415,305,262.0
1.02	05	01.00	02	004	Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	24 Kab/kota	Presentase Jumlah sampah yang tangani Di Sulawesi Selatan	19 %	SULAWESI SELATAN		497,933,491.0			24 Kab/kota	515,305,262.0

1.02	05	01.00	02	005	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	500 ton	Presentase Limbah B3 terhadap Total limbah B3 yang dikelola hingga akhir periode RENSTRA	56 %	SULAWESI SELATAN		1,989,999,981.72			550 ton	1,930,360,003.92
1.02	05	01.00	02	006	Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan Limbah B3	7 Jenis	Cakupan Ketersediaan pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan limbah B3	100 %	SULAWESI SELATAN		590,000,000.0			7 Jenis	630,000,000.0
1.02	05	01.00	02	007	Penjaminan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	3 Dokumen	Cakupan Ketersediaan dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	100 %	SULAWESI SELATAN		170,000,000.0			3 Dokumen	190,000,000.0
1.02	05	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	100 %					476,484,313.87			100 %	482,687,973.0
1.02	05	01.00	03	001	Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah PAD yang dihasilkan dari jasa Laboratorium Lingkungan	6500000000 Rupiah	Meningkatnya jumlah PAD	100 %	SULAWESI SELATAN		210,484,313.87			700000000 Rupiah	213,687,973.0
1.02	05	01.00	03	002	Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter yang Ter Akreditasi	60 Parameter	Peningkatan Parameter yang ter Akreditasi	100 %	Sulawesi Selatan		136,000,000.0			65 Parameter	137,000,000.0
1.02	05	01.00	03	003	Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah sampel yang diuji	1100 sampel	Peningkatan jumlah sampel yang diuji	100 %	Sulawesi Selatan		130,000,000.0			1150 sampel	132,000,000.0

1.02	05	01.00	04		PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %					687,907,433.26			100 %	701,986,050.26
						Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	24 kab/kota								24 kab/kota	
1.02	05	01.00	04	001	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi tindak lanjut Kasus/Perkara LH yang ditangani	14 Rekomendasi	Presentase jumlah kasus/Perkara LH yang ditindak lanjuti	100 %	Sulawesi Selatan		68,000,000.0			16 Rekomendasi	69,000,000.0
1.02	05	01.00	04	002	Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi, Lokasi Usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	14 Rekomendasi	Presentase jumlah pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	Sulawesi Selatan		68,000,000.0			16 Rekomendasi	69,000,000.0
1.02	05	01.00	04	004	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Kab/kota dan sekolah yang dibina	110 Sekolah dan Kab/kota	Jumlah sekolah peduli lingkungan yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional	14 Sekolah	Sulawesi Selatan		229,373,580.0			120 Sekolah dan Kab/kota	230,373,580.0
1.02	05	01.00	04	005	Pemberian Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima penghargaan lingkungan hidup	60 Sekolah	Presentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	100 %	Sulawesi Selatan		110,000,000.0			80 Sekolah	114,000,000.0

1.02	05	01.00	04	007	Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengtahuan Tradisional yang diverifikasi	20 MHA dan Kearifan Lokal	Cakupan Jumlah MHA dan Kearifan Lokal yang Telah diverifikasi	55 %	Sulawesi Selatan		131,592,747.0			20 MHA dan Kearifan Lokal	132,495,237.0
1.02	05	01.00	04	009	Pembinaan dan Penerapan Ekolabel, Teknologi Ramah Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam penerapan ekolabel dan teknologi ramah lingkungan	6 Produk	Meningkatnya kemampuan dalam penerapan ekolabel, teknologi ramah lingkungan	100 %	Sulawesi Selatan		80,941,106.26			7 Produk	87,117,233.26
1.02	05	01.00	05		PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota	100 %					793,842,730.75			100 %	804,178,286.69
						Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca	15 Kab/Kota								20 Kab/Kota	
1.02	05	01.00	05	001	Koordinasi Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)	Jumlah Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas Rumah kaca (GRK)	1 Dokumen	Presentase Perubahan Emisi CO2/Emisi GRK	4 %	SULAWESI SELATAN		300,000,000.0			1 Dokumen	302,500,000.0
1.02	05	01.00	05	004	Pembinaan dan Pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kabupaten/Kota/Prov. Sulawesi selatan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam Pelaksanaan KLHS dan RPPLH	24 Kab/Kota	Cakupan laporan KLHS yang tervalidasi dan terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan	10 dokumen	SULAWESI SELATAN		230,000,000.0			24 Kab/Kota	235,678,286.69
1.02	05	01.00	05	005	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1 Dokumen	Cakupan ketersediaan dokumen Rencana Pemanfaatan Kehati	60 %	SULAWESI SELATAN		151,500,000.0			1 Dokumen	152,500,000.0
1.02	05	01.00	05	006	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di Nilai	7 Dokumen	Cakupan dokumen LH yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya	60 %	SULAWESI SELATAN		112,342,730.75			7 Dokumen	113,500,000.0

1.02	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %					1,770,211,980.39			100 %	1,793,259,523.99
1.02	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah tenaga non PNS yang diadakan	21 orang	Cakupan ketersediaan jasa tenaga non PNS	100	Kantor DPLH Kota Makassar		718,200,000.0			21 orang	718,200,000.0
1.02	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang Tersedia	70 Jenis ATK	Cakupan Ketersediaan ATK	100	Kota Makassar		250,000,000.0			80 Jenis ATK	250,000,000.0
1.02	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Kota Makassar		20,000,000.0			60 Unit	20,000,000.0
1.02	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat atau pertemuan yang disediakan makanan dan minumannya.	260 Rapat	Cakupan ketersediaan makanan dan minuman rapat	100 %	Kota Makassar		350,000,000.0			270 Rapat	350,000,000.0
1.02	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti	1 Pameran	Cakupan ketersediaan pameran yang dilaksanakan dan diikuti	100	Kota Makassar		182,011,980.39			1 Pameran	155,059,523.99
1.02	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	45 Kali	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas	45 Laporan	SULAWESI SELATAN DAN JAWA		250,000,000.0			50 Kali	300,000,000.0
1.02	05	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %					362,045,877.45			100 %	366,759,588.71

1.02	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kendaraan dinas dan operasional kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	30000 Liter 62 jenis	Ketersediaan Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kendaraan dinas dan operasional kantor Cakupan ketersediaan perlengkapan dan peralatan kantor	100 % 100 %	Kota Makassar		45,354,877.45			35000 Liter 62 jenis	50,068,588.71
1.02	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 unit	Cakupan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	100 %	Kota Makassar		316,691,000.0			100 unit	316,691,000.0
1.02	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %					460,564,739.30			100 %	466,561,131.84
1.02	05	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum PD	100 orang	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan forum perangkat daerah LH	100 %	Kota Makassar		30,000,000.0			100 orang	30,000,000.0
1.02	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	8 Dokumen	Cakupan Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	100 %	SULAWESI SELATAN		30,000,000.0			8 Dokumen	30,000,000.0
1.02	05	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Laporan	Kota Makassar		50,000,000.0			1 Usulan Kegiatan	50,000,000.0
1.02	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	4 Jenis	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %	Sulawesi Selatan		157,064,739.30			4 Jenis	158,061,131.84

1.02	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	Kota Makassar		91,500,000.0			3 Laporan	91,500,000.0
1.02	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	Cakupan ketersediaan laporan pengelolaan administrasi keuangan	100 %			100,000,000.0			3 Laporan	105,000,000.0
1.02	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	4 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	100 %	Kantor DPLH Kota Makassar		2,000,000.0			4 Laporan	2,000,000.0
1.02	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100 %					129,926,861.69			100 %	131,618,464.18
1.02	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Pasang	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	Kantor DPLH Kota Makassar		65,000,000.0			100 Pasang	65,000,000.0
1.02	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah ASN yang diadakan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu.	110 ASN	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu.	100 %	Kantor DPLH Kota Makassar		64,926,861.69			115 ASN	66,618,464.18
JUMLAH												10,982,478,515.38				11,125,466,560.59

Sumber : RKPd Tahun 2020

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga selaras antara tema dan prioritas Provinsi dan Nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Makassar, Mei 2020
Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan,

Ir. H. Andi Hasdullah.,M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198603 1 022